



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GATUT SUGIARTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
3. NHK : 756398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.830.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 2.371 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/180 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 75.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/139 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 80.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 886 m2/200 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 3.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	145.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3E MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.839.336
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.006.839.336



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.006.839.336

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.